Capaian Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman

Kabinet Kerja 2014-2019

Perpres No. 10 Tahun 2015

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Mengkoordinasikan 4 Kementerian:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

pesona indonesia

Tol Laut

18 Trayek Tol Laut

Beroperasi pada 79 Trayek

6 Trayek Penugasan Pelni
2 Trayek ASDP

3 trayek Djakarta Lloyd
7 trayek Pelelangan Swasta

Dampak Langsung

- **ketersediaan barang kebutuhan** pokok dan barang penting lebih terjamin
- **berkurangnya fluktuasi** harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga dan memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah

Dampak Tidak Langsung

- **Tarif Ongkos** Kapal Swasta Berkurang

Surabaya – Timika 13 Juta/ Container
Awal mula 21 Juta/Container

- **Meningkatnya investasi di daerah**, khususnya untuk peningkatan nilai tambah sebagai muatan balik

Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dibeberapa daerah yang dilalui trayek tol laut selama periode 2018 adalah **sebesar 25 s/d 30%.**

Pengambil Alihan *Freeport*

21 Desember 2018
IUPK terbit & Divestasi 5%
SELESAI

27 Agustus 2018
Tandatangan
SPA antara INALUM,
Freeport dan Rio Tinto

27 Agustus 2018
Kesepakatan pokok Perundingan TERCAPAI

1. Freeport harus selesaikan Smelter dalam 5 tahun
2. Penerimaan Negara jadi lebih Besar dan KK diubah ke IUPK
3. Divestasi 51% saham Freeport Untuk Kepemilikan Nasional
4. Perpanjangan izin operasi 2x10 tahun Jika Syarat Terpenuhi

12 Juli 2018
HoA Divestasi
51% saham Freeport

Dampak Positif

- Kelangsungan Operasi PTFI (Aktivitas Ekonomi Papua)
- Tercipta Multiplier Effect (Smelter + TKDN)
- Diventasi Saham 51% Yang lebih efisien
- Pendapatan Negara Meningkat
- Transfer teknologi pengelolaan Tambang paling kompleks (Terowongan 700 Km)
- Menghindari Pengadilan Arbitase

Sumber: Kementerian ESDM

LRT (*Light Rapid Transit*) Jabodebek

Mampu menampung maksimal 474 ribu penumpang per hari dengan hanya dari Cibubur, belum termasuk dari Bogor, Depok, Bekasi dan dari Cikeas.

Diharapkan LRT dapat **mengurangi kepadatan Jakarta sampai 30%.**

LRT Jabodebek menggunakan sistem persinyalan *Moving Block* dan sistem pengoperasian *Grade of Automation* Level 3, yang berarti bahwa pengoperasian kereta tidak membutuhkan masinis karena dioperasikan seluruhnya oleh sistem. Dengan sistem tersebut, *headway*/jarak **keberangkatan antar kereta dapat mencapai 3 menit.**

Kereta LRT Jabodebek merupakan rakitan PT INKA di Madiun, tidak ada yang diimpor secara utuh

Transfer Of Technology
komponen-komponen di dalamnya yang dikerjasamakan PT INKA dengan vendor asing dimana dalam pengadaannya.

Prasarana yang terdiri atas lintasan, stasiun, depo, dan infrastruktur penunjang lainnya, dibangun oleh **PT Adhi Karya (Persero).**

Rute LRT Jabodebek tahap 1
1) Lintas 1: Cawang – Cibubur
2) Lintas 2: Cawang – Dukuh Atas
3) Lintas 3: Cawang – Bekasi Timur

Total ada 12 lembaga keuangan yang memberikan kontrak pinjaman kredit sindikasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, Bank Mega, dan BTMU.

13 Oktober 2019

kegiatan prosesi pengangkatan kereta pertama LRT Jabodebek ke lintasan (*track*) di Stasiun Harjamukti Cibubur.

Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 telah mencapai 66%

Ditargetkan beroperasi **mengangkut penumpang secara komersial pada November 2021.**

Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral

di Kawasan Industri Morowali

Larangan Bijih Nikel pada 2014 - 2017 telah Berkontribusi Signifikan terhadap Investasi pada Produk Hilir (> US$ 8 Miliar) dan Peningkatan Ekspor Stainless Steel (dari US$ 1 Miliar pada 2014 menjadi US$ 5.7 Miliar di 2018)

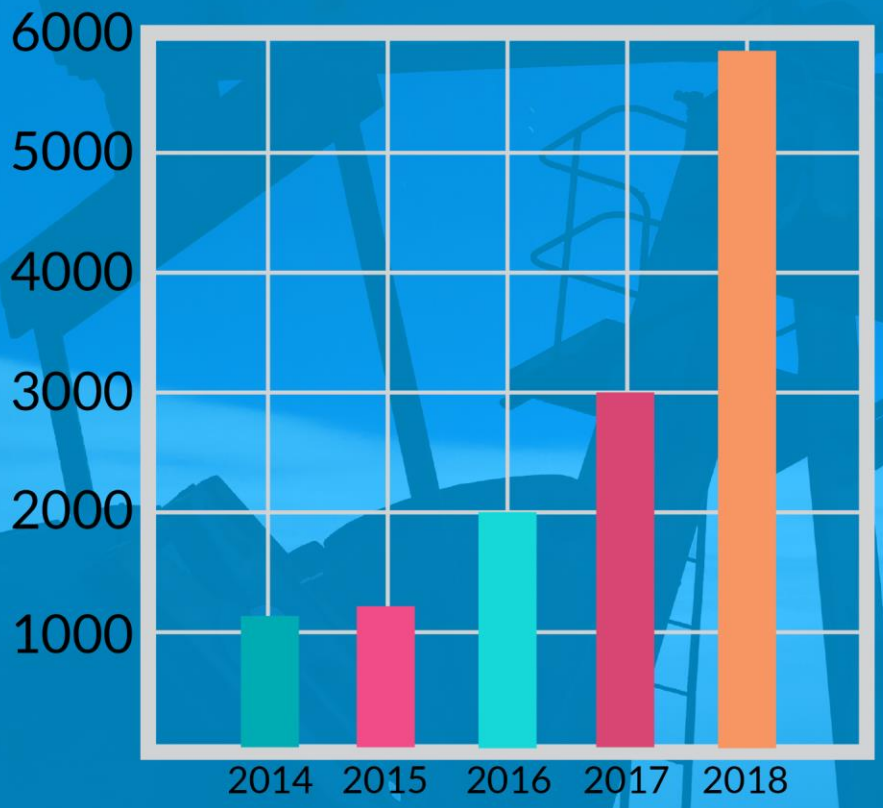

Total nilai investasi sebesar USD 8 miliar di kawasan industri terintegrasi dengan **fokus produksi berbasis nikel** (*smelting, stainless steel*, dan *carbon steel*). Mempekerjakan 23 ribu pekerja (85% WNI).

Total produksi saat ini sekitar 4-5 juta ton *stainless steel* dan karbon steel. Dengan tambahan investasi, diharapkan produksi mencapai 10 juta ton. Hasil produksi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga mengurangi angka impor.

Proyek ini telah memberikan kontibusi sejumlah Rp 1.7 triliun dalam bentuk pajak dan royalti dan **mengekspor lebih dari USD 1 miliar** dalam kurun waktu 2013-2017.

Peningkatan ekspor hilirisasi ekspor Nikel (NPI, fero nickel dan stainless steel berkontribusi signifikan terhadap ekspor sehingga berkontribusi terhadap penurunan defisit neraca perdagangan di sektor besi-baja.

Diplomasi Sawit dan Mandat Biofuel 20

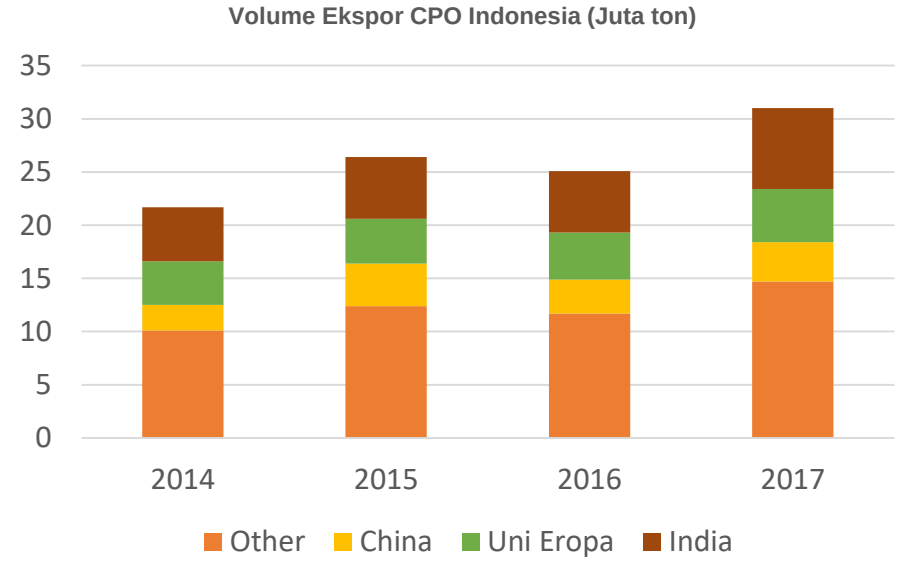

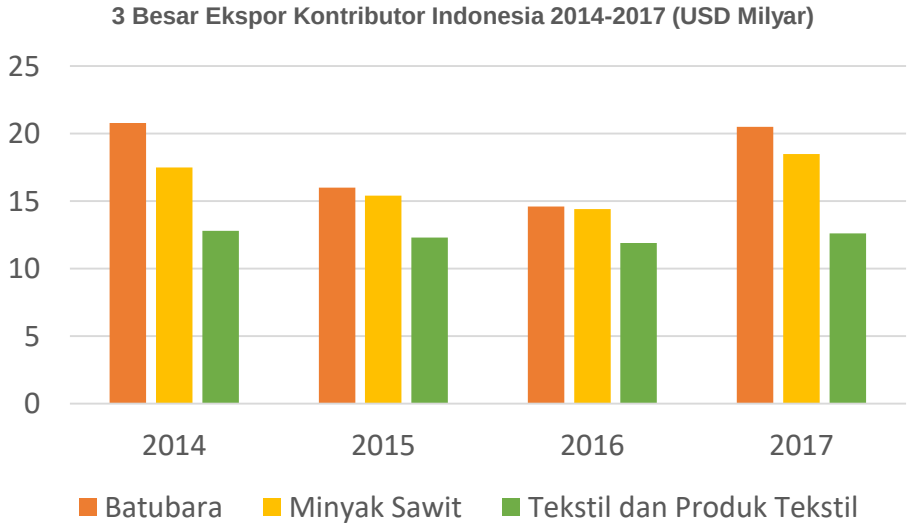

***Crude Palm Oil* berkontribusi besar** terhadap **Ekspor Indonesia. Ekspor Kelapa Sawit dan Produk Turunannya** memiliki **kontribusi ke-2 terbesar** (setelah batubara), dengan **nilai ekspor sebesar US$ 18.5 milyar** di **tahun 2017** dengan volume mencapai **31 juta ton**. **India, Uni Eropa dan Tiongkok** adalah **pasar ekspor terbesar** dari komoditas ini.

Sektor Kelapa Sawit Memiliki **Kontribusi Signifikan** Terhadap **Penyerapan Tenaga Kerja** dan **Penciptaan Kesejahteraan Petani Kecil**.

2,3 juta petani kecil men*support* hidup 6,9 juta orang

5,5 juta orang pekerja langsung, dengan **12 juta orang pekerja tidak langsung**. Sehingga **total penyerapan** seluruh tenaga kerja adalah **17.5 juta.**

Diplomasi Sawit dan Mandat Biofuel 20

(Lanjutan)

Ancaman Pasar Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Uni Eropa

14 Juni 2018

Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa mencapai kesepakatan politik tentang rancangan revisi Directive Energy, bagian dari Paket Energi Bersih ("RED II"). Directive telah mulai berlaku dan Negara-negara Anggota diminta untuk mengubah sebagian ketentuannya ke dalam undang-undang nasional paling lambat 30 Juni 2021.

RED II tidak mengandung larangan eksplisit atas penggunaan Minyak Kelapa Sawit sebagai bahan bakar nabati di UE (juga tidak ada pembatasan perdagangan eksplisit seperti larangan impor atau penjualan Minyak Sawit). Namun, Petunjuk tersebut kemungkinan akan berdampak negatif pada tingkat impor dan penjualan Minyak Sawit di UE karena dalam RED II dinyatakan bahwa bagian biofuel yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan (seperti Kelapa Sawit) yang dikonsumsi di sektor transportasi di UE, akan dibatasi hingga maksimum 7% (pada tahun 2021) dan secara bertahap dihapuskan sepenuhnya (pada tahun 2030).

India

India menaikkan tarif impor untuk CPO dan turunannya menjadi 44% dan 54%.

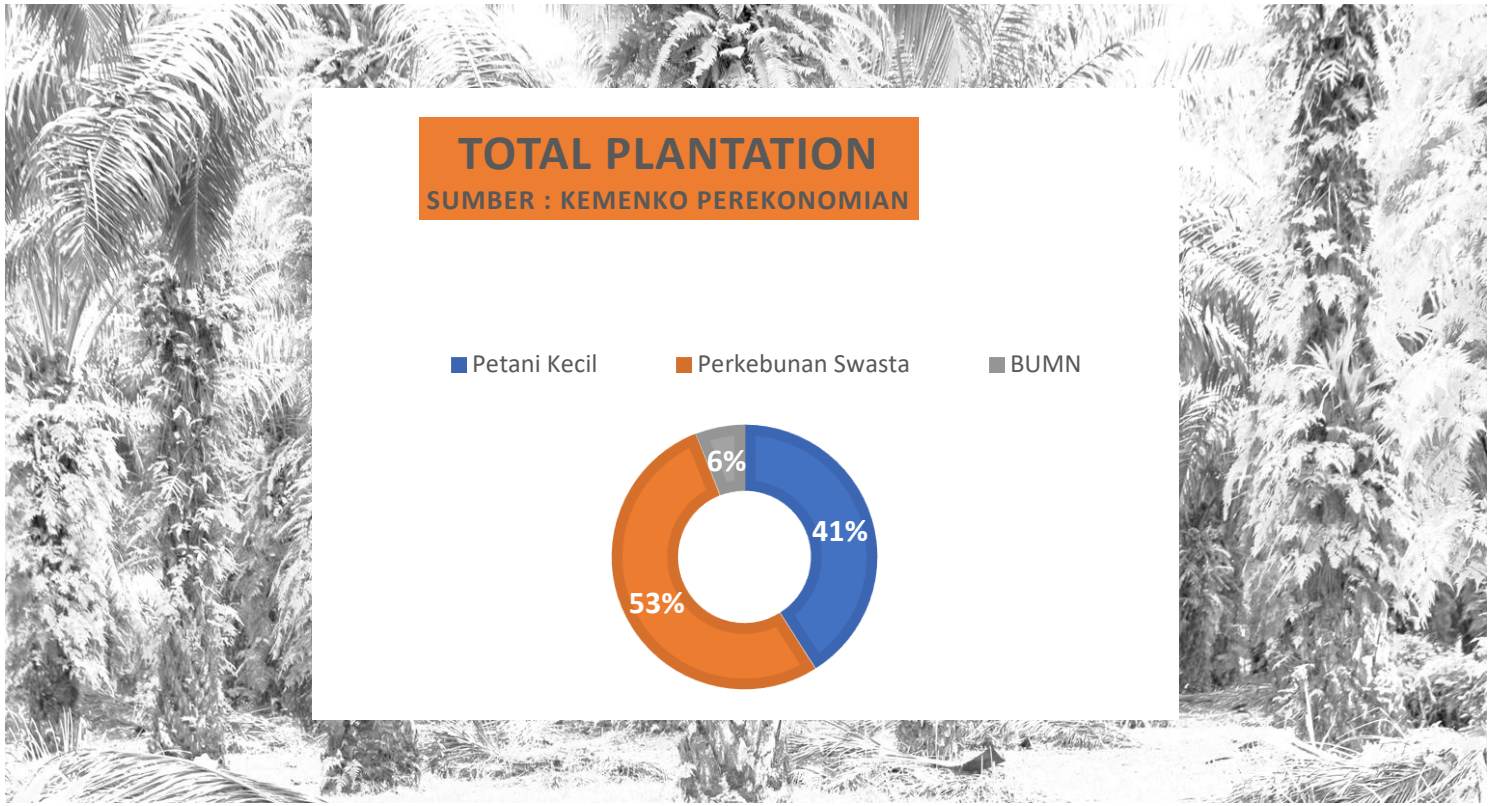

Diplomasi Sawit dan Mandat Biofuel 20

(Lanjutan)

2007

Joint Conservation Agreement

Indonesia, Brunei and Malaysia to conserve Borneo Island

2011

Implementation of Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
Minister Regulation No.19/2011

Moratorium and improvement of management of Primary Forest and Peatland
Presidential Instruction 10/2011

2014

Policy on Primary Forest land settlement

2015

Management of Forest Fire Prevention
Presidential Instruction 11/2015

Moratorium and improvement of management of Primary Forest and Peatland
Presidential Instruction 8/2015

Establishment of CPO Fund
Presidential regulation 1/2015

ISPO Certification
Minister Regulation No 11/2015

2016

FLEGT License
Indonesia is among the first country to implement Voluntary Partnership Agreement with EU

Establishment CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries)
Presidential Regulation 42/2016

Establishment of Peatland Restoration Agency
Presidential Regulation 1/2016

One map policy implementation
Presidential Regulation 9/2016

2017

Launch of smallholders Replanting Program

By President Joko Widoo. National target 2.4 Million Ha in 16 Provinces

On Going

On going regulation
1. Strengthening ISPO
2. Continuous Moratorium for Primary Forest & Peatland
3. Etc

Diplomasi Sawit dan Mandat Biofuel 20

(Lanjutan)

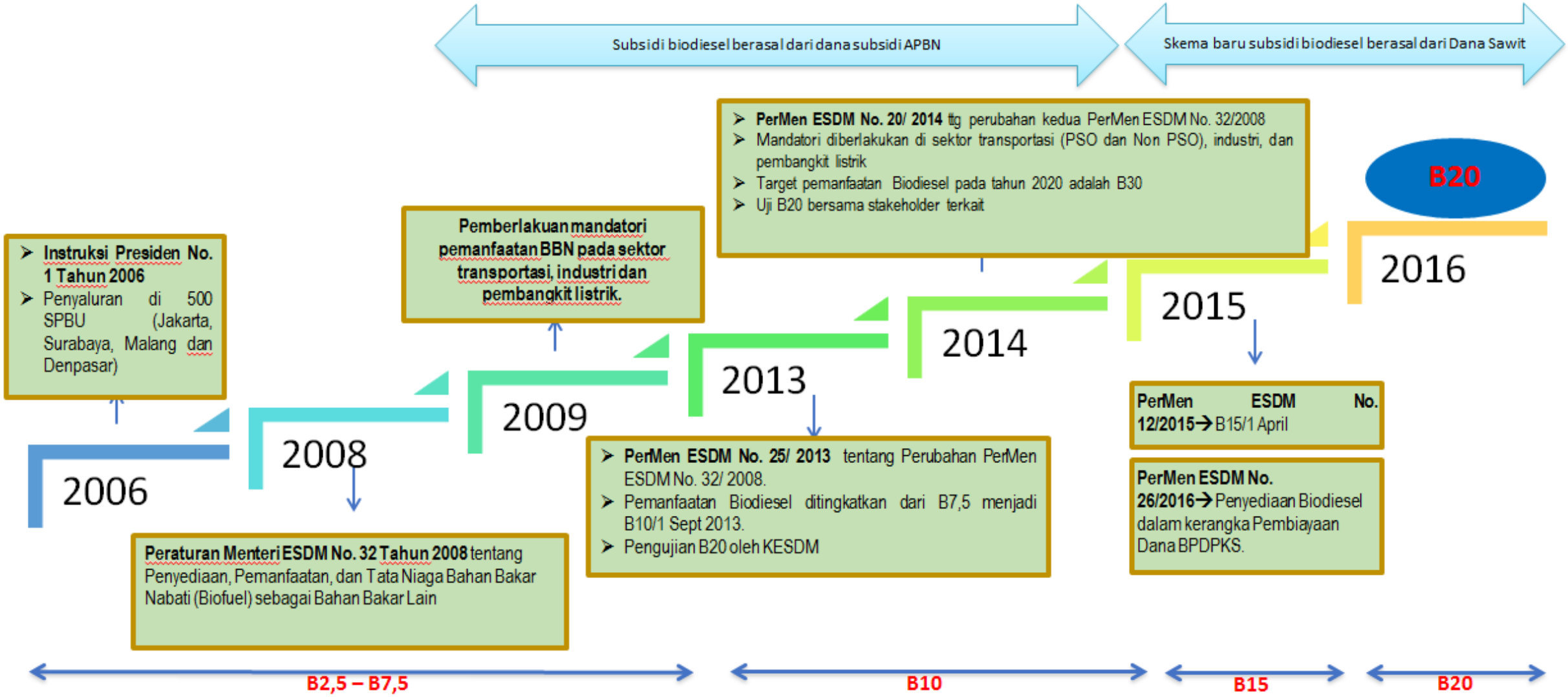

Diplomasi Sawit dan Mandat Biofuel 20

(Lanjutan)

Kontribusi Mandatori Biodiesel

- Membangun ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil
- Mengurangi impor solar sehingga mengurangi pula pengeluaran devisa untuk impor solar
- Mitigasi terhadap perubahan iklim global
- Pembangunan pedesaan sebagai basis produksi bahan baku biofuel

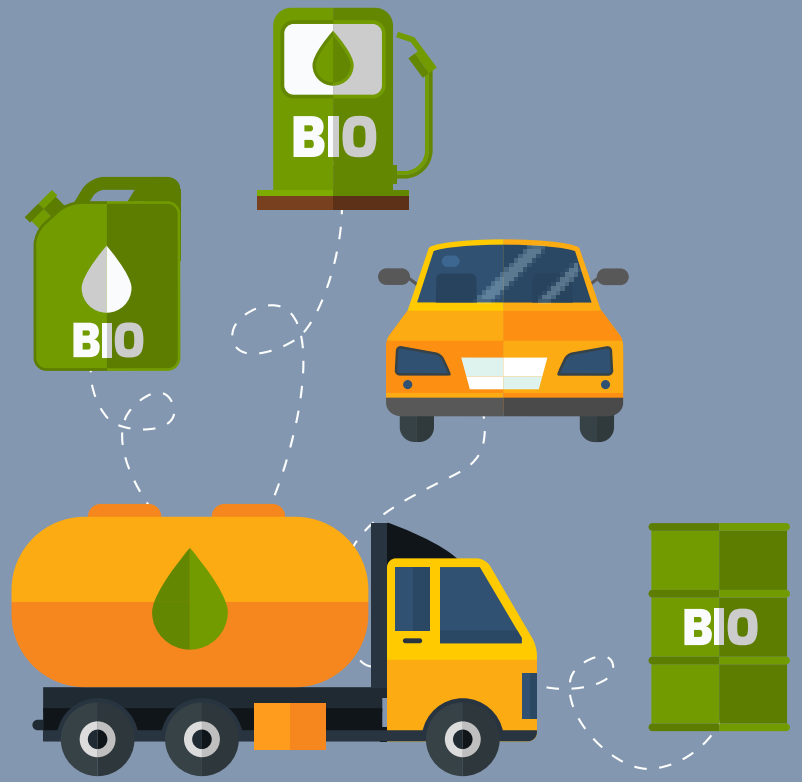

Citarum Harum

Penanganan Lahan Kritis

- **Anggaran TNI 2019** sebesar 300 M telah disetujui dan digunakan **untuk operasional TNI di 22 sektor plus 1 pembibitan.**
- **Penanaman 1,9 juta batang pohon/tegakan** keras oleh Satgas Citarum Harum.
- **Sinergi penanganan lahan kritis**

BPDAS HL, Perhutani, PTPN VIII, Artha Graha Peduli (200 ha), Yayasan Budiasi (100 ha), Sereh Wangi (50 ha) Dinas Kehutanan Kehutanan PProvinsi dan Kabupaten serta Dinas PertanianProvinsi/Kabupaten.

Perbaikan Lingkungan

Penataan oxbow dan danau retensi.

Penataan Keramba Jaring Apung

- **Sedang dilakukan pengkajian oleh pakar-pakar dari perguruan tinggi dan LIPI mengenai Daya Dukung waduk** sebagai dasar penetapan jumlah KJA yang diperbolehkan. Target, selesai pertengahan September 2019.
- Upaya pengurangan KJA yang yang telah dilaksanakan selama ini, antara lain: **Saguling 2.800 petak (dari total 35.482 petak), Cirata: 10.777 petak (dari total 98.397petak), Jatiluhur 10.553 petak (dari total 40.932 petak)**

Penegakan Hukum

- **Supervisi perbaikan IPAL industri**
- ***Shock therapy* dengan pengecoran saluran pembuangan limbah illegal** dan tanpa pengolahan terlebih dahulu merujuk merujuk Pasal 9 Perpres 15 Tahun 2018.
- **Komandan Sektor bekerja sama dengan Polda Jabar** untuk melakukan pembinaan dan penegakan hukum untuk untuk industri industri yang tidak mengaplikasikan pengolahan limbah dengan baik.

Penanganan Sampah Plastik Laut

Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Nasional.
Antara lain : Gerakan indonesia bersih, Sekolah Pantai, Gerakan Generasi Bijak Plastik

Kendaraan Bermotor Listrik Nasional

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019

Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap
imported base energy

pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu alternatif, sejalan dengan perkembangan teknologi kendaraan yang bergeser dari
berbahan bakar minyak fosil menjadi kendaraan listrik

Archipelagic and Island States Forum (AIS)

Pemerintah RI berencana menggelar AIS *Startup Business Summit* (SBS) pada tahun 2019.

Menghubungkan antara lembaga pemerintah, pengusaha, pelaku bisnis rintisan digital maupun komunitas antar negara-negara peserta AIS untuk bekerja sama menangani masalah perubahan iklim, ekowisata, *marine plastic debris* dan ekonomi biru.

Pemerintah Indonesia kucurkan dana sebesar Rp 2,8 milyar yang merupakan bagian dari **pembentukan dana awal sebesar USD 1 Juta**

21 Negara

Asia Pasifik Karibia Afrika Eropa

Diinisiasi tahun 2017

terbentuk secara resmi di Manado Bulan November 2018

Pengembangan *Geopark* Indonesia

Tahun 2017

Kenaikan status 5 *Geopark* Nasional (Belitung, Maros Pangkep, Tambora, Bojonegoro, Raja Ampat)

Tahun 2018

Kenaikan 8 *Geopark* Nasional (Natuna, Pongkor, Banyuwangi, Silokek, Ngarai Sianok, Sawahlunto, Karangsambung-Karangbolong, Meratus)

Revalidasi Batur lolos 2017

Ciletuh Palabuhanratu mendapat sertifikat UGGp April 2018

Geopark Nasional Kaldera Toba berhasil lolos *council* dan akan ditetapkan April 2020

Gunung Sewu UGGp mendapat *green card* yang akan ditetapkan April 2020

Pendampingan GN Belitong untuk menjadi UGGp

Terselenggaranya Konas I *Geopark* Indonesia 12 Juli 2018, sebagai tonggak pembangunan *Geopark* berkelanjutan dan terbitnya Perpres 9 Tahun 2019 tentang pengembangan *Geopark*.

Asia Pacific Geopark Network Symposium
Ke-6 di Rinjani NTB Tahun 2019

612 Peserta
Dari 31 Negara

Flight Information Region

Pengambil-alihan kendali ruang udara **Tidak ada urusan kedaulatan Negara,** **FIR itu adalah masalah teknis.**

Tahun 1993

Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan International *Civil Aviation Organization* (ICAO) di Bangkok

Gagal karena Indonesia dianggap **belum memiliki peralatan dan infrastruktur yang memadai**

Indonesia dan Singapura **telah saling sepakat terhadap kerangka negosiasi** untuk ***Flight Information Region*** (FIR) atau kendali ruang udara.

Pertemuan Teknis 1 April 2019

Singapura telah **menyetujui bahwa koridor Laut China Selatan dapat dilayani oleh Indonesia.**

Global Maritime Fulcrum - Belt Road Initiative (GMF-BRI)

Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Koridor Ekonomi Regional Komprehensif antara pemerintah RI dan Tiongkok ditanda-tangani di Beijing pada tanggal 7 Mei 2018.

Pada tanggal **23 Oktober 2018 Pemerintah RI dan Tiongkok menandatangani MoU pembentukan Komite Pelaksana Pengembangan Koridor Ekonomi Regional Komprehensif**. Selain itu, pada tanggal yang sama kedua negara juga menyepakati MoU kerja sama dalam kerangka GMF-BRI.

Dalam kerangka kerja sama tersebut, **Indonesia menawarkan 30 proyek** di empat koridor **kepada pemerintah Tiongkok**, yakni **Sumatera Utara**, **Sulawesi Utara**, **Kalimantan Utara** dan **Bali**. **Proyek-proyek** tersebut antara lain **pembangkit listrik tenaga air**, **pengembangan ekowisata**, dan **pengembangan industri terintegrasi**.

Prinsip dasar Kerja Sama GMF-BRI: Menggunakan **teknologi canggih dan ramah lingkungan**, **memanfaatkan tenaga kerja lokal**, menggunakan **pendekatan pengembangan terintegrasi**, ada **alih teknologi**, secara teknis **kerja sama** dilakukan **B to B**, **berorientasi pada kebutuhan pasar**. **Pemerintah** dalam hal ini **memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan**.

Pendidikan Kemaritiman

- Kurikulum kemaritiman telah diimplementasikan di sekolah percontohan di 34 provinsi
- Dilakukan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK NonKemaritiman
- Kemendikbud sedang melaksanakan pelatihan untuk para guru se Indonesia tentang Pendidikan Kemaritiman

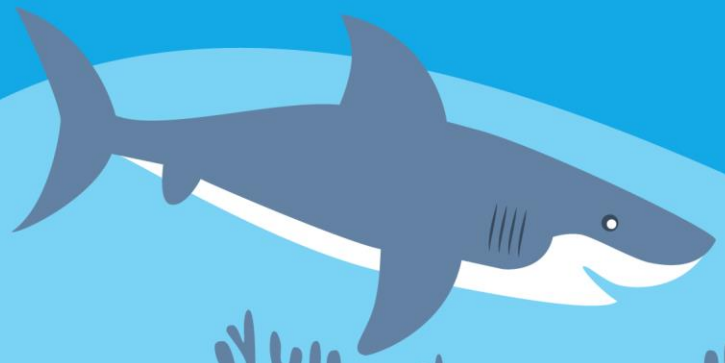

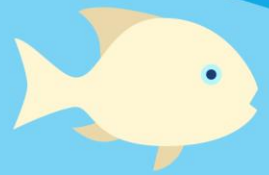

Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ)

Meningkatkan wawasan kemaritiman generasi muda Indonesia dan menguatkan konektivitas antar pulau-pulau terluar dan terdepan di seluruh wilayah NKRI melalui keterlibatan pemuda dan mahasiswa

Menggunakan KRI Banda Aceh, KRI Dewa Ruci dan kapal perintis.

Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari: Pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan infrastruktur.

Minat Pemuda Ikut Dalam ENJ

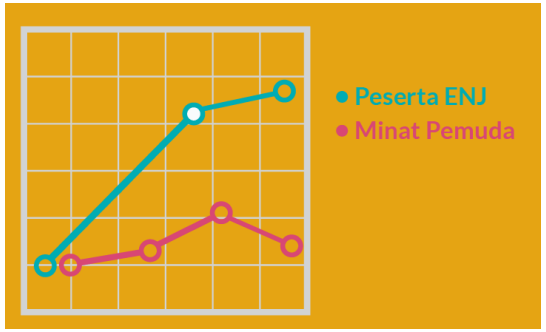

Tahun	Peserta ENJ	Pendaftar (Minat)
2015	600	1000
2016	1000	7000
2017	3000	13600
2018	525	(PT)

*) PT : Rekrutmen Melalui Perguruan Tinggi

Pengembangan Destinasi Wisata Priotitas

PEMBANGUNAN PARIWISATA

Indeks Daya Saing

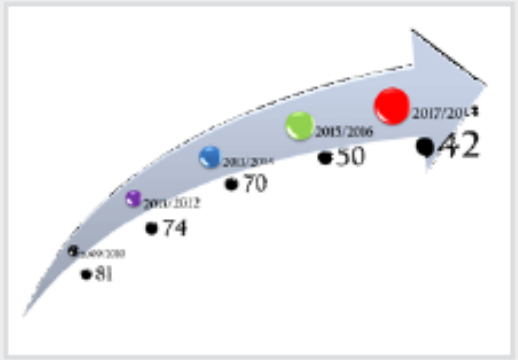

Sumber : KEMENPAR

Jumlah Wisatawan
(dalam juta orang)

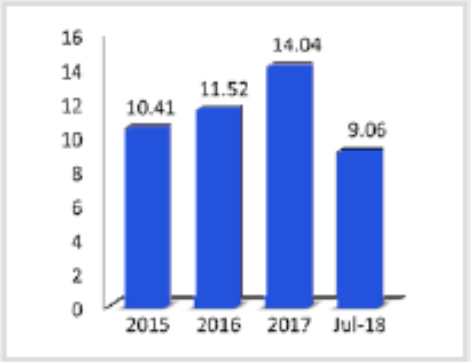

Sumber : KEMENPAR

Devisa Komoditas Pariwisata
(dalam juta US$)

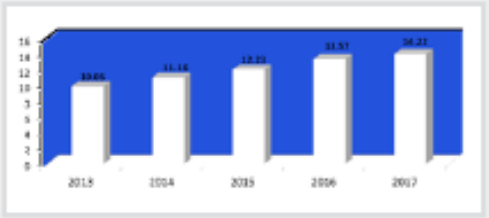

Sumber : KEMENPAR

Pengembangan 10 KSPN Wisata (BOP & KEK)

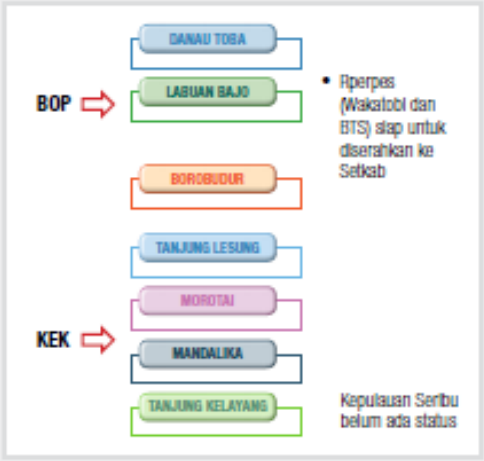

Sumber : KEMENPAR

Pengembangan Destinasi Wisata

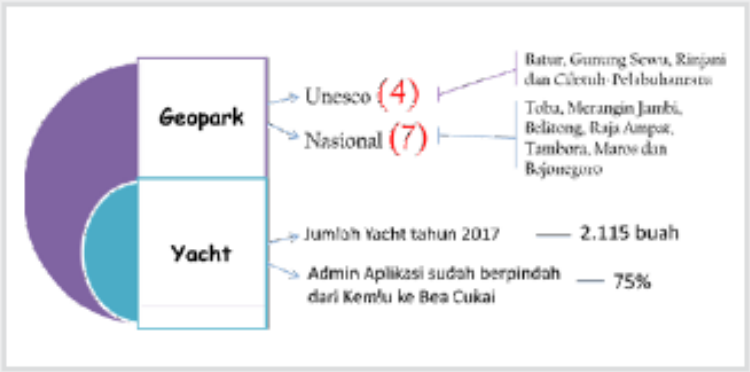

Sumber : KEMENPAR

PENGHARGAAN

BALI

Bali Raih The Best Island in Asia Pacific (2018)

NIHIWATU RESORT

Nihiwatu Resort, Sumba Terpilih sebagai **HOTEL TERBAIK DUNIA (2016)**

Sumber : KEMENPAR

Sumber: Kemenpar

Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Penurunan Muka Tanah
Di Dataran Rendah Pesisir

Peta Potensi Penurunan Permukaan Tanah

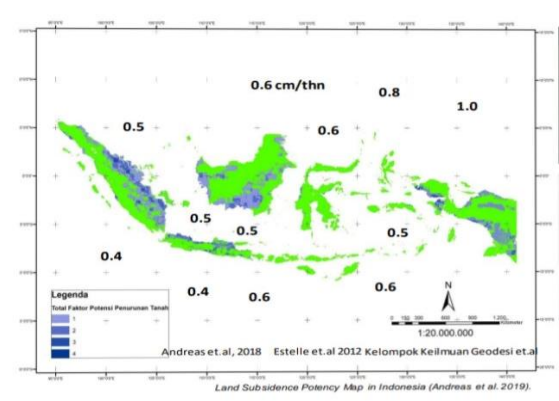

Land Subsidence Potency Map in Indonesia (Andreas et al. 2019).

Peta Jalan Penanganan Subsiden Tanah

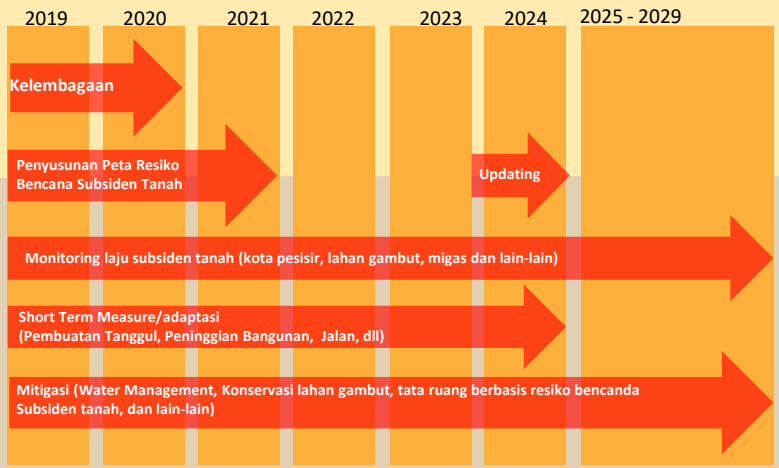

132 kota/kabupaten di 21 provinsi
terindikasi mengalami amblesan tanah

Luas Indikasi Subsiden Lahan Gambut

Sumatera	Kalimantan	Papua
4.767.167 ha (74%)	2.423.190 ha (50%)	455.669 ha (12%)

Fahmudin n et,al,2014

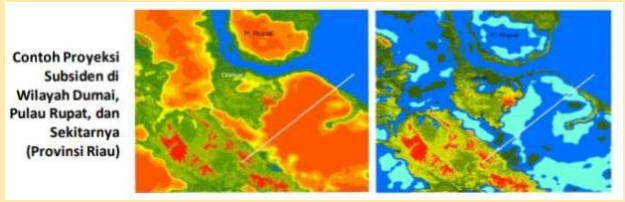

Hasil Penelitian

laju rata-rata penurunan tanah
Mulai dari 1-20 cm/tahun

kenaikan air laut
Mencapai 4 mm-1 cm/tahun

DAMPAK Amblesan Tanah

- **Menghambat Upaya Konservasi Upaya Konservasi dan Rehabilitasi di Kawasan Pesisir Utara Jawa**
- **Berpotensi Menghilangkan Ekosistem Gambut Tropis Seperti di Pantai Timur Sumatera**

International Monetary Fund – World Bank

2018

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan

Pertemuan Tahunan IMF-WB Annual Meetings 2018
pada tanggal 8 s/d 14 Oktober 2018 di Kawasan Nusa Dua Bali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Panitia Nasional telah memutuskan untuk menjual paket-paket Wisata

189 Delegasi

15000 Orang Total Peserta

7 Destinasi Wisata

SIDE ACTIVITY

1. Pameran Dagang
2. Pameran Dalam Negeri
3. Promosi Wisata
4. Pameran Infrastruktur
5. Forum Investasi
6. Pameran bidang ekonomi

Dampak Ekonomi IMF WB:

- Biaya akomodasi dan makan para delegasi selama pelaksanaan Annual Meeting 2018 ditanggung sendiri
- Pemerintah Indonesia telah menyediakan 21 Official Hotels yang akan disewa oleh Delegasi selama kegiatan berlangsung.
- Jumlah pekerja lokal yang terlibat kurang lebih 20.000 orang
- Kurang lebih 60 Paket Wisata di 7 Destinasi

Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Garam

Ekstensifikasi Lahan Garam

Fasilitasi Percepatan Penetapan Tanah Terlantar (PTT) 1 luas 3.720 hektar eks HGU di Kabupaten Kupang-NTT.

Intensifikasi Lahan Garam

Koordinasi pada produsen garam mengenai fortifikasi garam sebagai sarana peningkatan kualitas produk.

Diversifikasi Produk Garam

Menjadikan CV Rama Shinta yang memproduksi garam spa di Cirebon telah memperoleh Izin Usaha Industri sebagai salah satu percontohan diversifikasi produk turunan garam

Pengendalian Harga Garam

Mendorong penetapan garam sebagai barang penting dengan melakukan Revisi Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting.

Terima Kasih